

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Moegandi, 1996, Mengenal Dunia Penerbangan Sipil, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Azwar Ananda, 1997, Pengantar Hukum Udara Internasional dan Indonesia, Padang

Boer Mauna, 2000, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, *Alumni*, Bandung.

Diederiks-Verschoor, 1991, Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2006, An Introduction to Air Law. Eight Revised Edition, *Kluwer Law International*. Netherlands.

Frans Likada, 1987, Masalah Lintas di Ruang Udara, Binacipta, Bandung.

F Sugeng Istanto, 1998, Hukum Internasional, Atmajaya, Yogyakarta.

John C. Cooper, 2003, Aerospace Law—Subject Matter and Terminology. Recueil des courses, JALC.

K. Martono, 2007, Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional Bagian Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

K. Martono dan Usman Melayu, 1996, Perjanjian Angkutan Udara di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Matte, 1981. Treatise on Air-Aeronautical Law, Montreal: ICASL-McGill University.

Mike Komar Kantaadmadja, 1960, Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara, Penerbit Alumni, Bandung.

Nicolas MettescoMette, 1981, Treatise on Air-aeronautical Law, Canada.

Saefullah Wiradipradja, 2008, Hukum Transportasi Udara dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999, Kiblat Buku Utama, Bandung.

_____, 2014. Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa Buku I Hukum Udara, Alumni, Bandung;

Syahmi, dkk, 2012, Hukum Udara dan Luar Angkasa, Unsri Press, Palembang

Wahyono S.K, 2009, Indonesia Negara Maritim, Jakarta

Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONVENSI

Convention Paris 1919 For the Protection of Industrial Property

Convention on International Civil Aviation signed at Chicago on 7 December 1944 yang dikenal dengan Konvensi Chicago 1944 (Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional)

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang TNI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan angkutan udara bukan niaga dan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Perhubungan No. 109 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan angkutan udara bukan niaga dan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing ke dan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No. KP 112 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara

C. SUMBER LAINNYA

Ade A.Y Marbun, “Prinsip antara Hukum Udara Internasional dan Hukum Udara Nasional”, dalam <http://ademarbun.blogspot.co.id/2012/11/prinsip-antara-hukum-udara-nasional-dan.html> diakses 27 Januari 2016, pukul 22.35 WIB.

Asuransiaspan, <https://asuransiaspan.co.id/insurance/asuransi-pesawat-terbang/>, di akses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 3.42WIB

Ana.co, <https://www.ana.co.jp/id/id/serviceinfo/international/inflight/guide/y/ground/>, di akses pada tanggal 14 Agustus 2019 pada pukul 4.01WIB

Corporatejetinvestor, <https://corporatejetinvestor.com/articles/register-aircraft-isle-man/>, di akses pada tanggal 14 Agustus 2019, pukul 3.37WIB

Dewi Agustina, 2019, <http://www.tribunnews.com/regional/2019/01/18/ethiopian-airlines-akhirnya-dapat-izin-terbang-setelah-3-hari-dipaksa-mendarat-di-bandara-hang-nadim>, diakses pada tanggal 2 Juni 2019, pukul 08.14 WIB.

Denny lorenta, <https://dennylorenta.wordpress.com/2010/05/06/kedirgantaraan-dan-konsepsi-kedaulatan-suatu-negara-di-udara/>, diakses pada tanggal 28 Juli 2019, pukul 23.00.

Danang Risdiarto, 2016, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Wilayah Udara Yurisdiksi Indonesia Oleh Pesawat Asing Tidak Terjadwal, RechtsVinding, Jakarta Timur

Direktorat Jendral Perhubungan Udara, Pemberian Persetujuan Pesawat Terbang (*FlightApproval*),

<http://hubud.dephub.go.id/?id/izin/detail/38>, di akses pada tanggal 14 Agustus 2019, pada pukul 22.00WIB

Gipsonavirginianhttps://www.academia.edu/7718727/PERJANJIAN_PENGANGKUTAN_UDARA_DI_INDONESIA, di akses pada tanggal 19 Juni 2019, pukul 21.34WIB.

HAMKAM, 2013, Urgensi Pengaturan Lalu Lintas Ruang Udara Indonesia Guna Menetapkan Stabilitas Keamanan Wilayah Udara Nasional Dalam Rangka Memperkukuh Kedaulatan NKRI, *jurnal kajian LEMHANNAS RI*, Edisi 16

Iomaircraftregistry, https://www.iomaircraftregistry.com/media/1344/in-022-diger_ca.pdf, di akses pada tanggal 14 Agustus 2019 pukul 3.32WIB

Sefriani, 2015. Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 4 Vol: 538 – 565, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sekolah Pilot, <https://www.sekolah-pilot.com/apa-itu-ppl-cpl-ir-me/>, di akses pada tanggal 14 Agustus 2019, pukul 3.39WIB

Standar Nasional Indonesia (SNI), Terminal Kargo Bandar Udara, pdf, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019, pukul 4.06WIB

TNI Angkatan Udara, 2014, <https://tni-au.mil.id/sukhoi-tni-au-semakin-menggiriskan-force-down-tiga-black-flight/> diakses pada tanggal 1 Juni 2019, pukul 22.38 WIB.

Machaviatrix, <https://www.machaviatrix.com/begini-rencana-penerbangan-yang-aman/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019, pada pukul 3.50WIB